

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang. Di dalam negara yang demokratis Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu kegiatan politik yang menjadi syarat bagi kehidupan suatu negara. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Nugraha (2017, hlm.120) bahwa pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, namun format demokrasi yang ideal baru nampak pada penyelenggaraan pemilu 2004 lalu yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden, yang berjalan relatif cukup lancar dan aman. Sistem politik Indonesia dari sisi prosedur telah mengalami kemajuan. Misalnya, pemilihan umum presiden dan legislatif sudah terdapat jadwalnya. Aminudin (2011, hlm. 1) mengemukakan bahwa nilai klasik dari demokrasi umumnya ditakar dari seberapa besar kesadaran rakyat berpartisipasi dalam memberikan suaranya pada sebuah Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2016 penetapan mengenai waktu pemungutan suara agar serentak secara nasional untuk Pileg, Pilpres dan Pilkada secara rinci yaitu Pilkada pada 2015 digelar lagi tahun 2020. Pilkada 2017 digelar lagi tahun 2022. Pilkada 2018 digelar lagi 2023. Maka didapati satu tahun yang mendekati semuanya bisa serentak yaitu 2024. Ini karena keteraturan mekanisme politik Indonesia yang sudah tersusun dengan baik. Sehingga seorang presiden dan anggota dewan legislatif sudah mengetahui jauh-jauh hari kapan jabatannya berakhir dan kapan ia harus memulai siap menghadapi pemelihan berikutnya. Prajarto (2011, hlm. 354) rantai perebutan inilah yang menggiring sejumlah aktor politik menyadari adanya kompetisi yang harus

Muhamad Hijran, 2018

PERAN PENDIDIKAN POLITIK KADER PARTAI DALAM MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

mereka lalui, mulai dari kompetisi di tingkat internal hingga ke arena pertarungan dengan kompetitor eksternal.

Namun demikian, fakta menunjukkan efikasinya belum seperti yang diharapkan, belum diikuti perubahan maksimal dari sisi kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Sebagai contoh semakin maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan melemahnya kepercayaan terhadap lembaga politik, seperti partai politik. Tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabulasi Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun
2011-2017

Jabatan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah
Anggota DPR dan DPRD	5	16	8	9	19	23	20	100
Kepala Lembaga/Kementerian	0	1	4	9	3	2	0	19
Gubernur	0	0	2	3	3	1	1	10
Walikota/Bupati dan Wakil	3	3	3	12	4	9	13	47

Sumber: *Webset KPK Tahun 2018*

Di lain pihak partai politik sebagai inprastruktur politik belum melaksanakan fungsinya secara optimal, terutama pendidikan politik terhadap kadernya. Akibat belum optimalnya pendidikan politik yang memadai di masing-masing partai politik. Jimly Ashiddiqie (dalam Putra, 2017, hlm. 64) mengibaratkan partai politik sebagai organisasi yang mengandung beberapa kelemahan diantaranya ialah bahwa organisasi cenderung bersifat oligarkis. Organisasi tersebut kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya di lapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya

Muhamad Hijran, 2018

PERAN PENDIDIKAN POLITIK KADER PARTAI DALAM MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

sendiri. Semua partai masih memprioritaskan fungsi partai sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan saja. Suryadi (2017) praksis politik akhir-akhir ini diwarnai pikiran jangka pendek. Politik mengalami pendangkalan makna. Politik cukup dipahami sebagai merebut kuasa. Kekuasaan yang cenderung korup seperti dikendalikan Lord Acton seolah menjadi pembenaran atas kinerja buruk atau tindakan tak terpuji. Padahal disetiap partai manapun yang ada di Indonesia, baik didalam AD dan ART, program umum, visi misi dan maupun kebijakan lainnya selalu ditekankan bahwa ada kewajiban partai untuk melaksanakan pendidikan politik, terutama terhadap kadernya.

Lebih lanjut Suryadi (2017) Huntington menyempurnakan definisi Acton tentang politik, *power not only corrupts, but also educates*. Karena bertugas mendidik maka berpolitik menuntut karakter kuat, politik is karakter, demikian kata Dr. Setiabudi. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara menambahkan dimensi etis dalam politik, politik adalah watak dan jiwa kekesatriaian (*politik is ridderdom en ridderlijkheid*). Kemudian, Sunatra (2016, hlm. 358) selain hal tersebut ada dua faktor-faktor yang dihadapi partai politik yaitu: 1). Faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor dari masyarakat, dimana masyarakat masih banyak yang mempunyai gambaran bahwa berhubungan dengan negara, maupun partai politik adalah gambaran buruk. Masyarakat masih mempunyai citra yang buruk tentang partai politik, selain itu juga gambaran partai politik hanya melulu mengejar kekuasaan dan bila sudah berkuasa banyak yang melakukan penghianatan terhadap amanat rakyat, misalnya korupsi atau kongkalikong dengan pihak kapitalis yang merugikan rakyat. 2). Faktor internal. Faktor ini berasal dari sikap partai sendiri. Hasil analisis menunjukkan partai masih bersifat tertutup dan cenderung berorientasi kepada kepentingan sendiri. Dimana sistem rekrutmen masih dipengaruhi oleh mekanisme yang tidak baik dan tidak teratur. Seperti yang di kemukakan oleh Sarbaini dkk (2014, hlm. 601) bahwa

Para pejabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat, Janji-janji yang dulu dibuat justru dilupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang diperoleh, Partai politik pun juga masih belum menunjukkan kinerja dengan baik dan tanggung jawabnya pada masyarakat. Mesin- mesin parpol yang seharusnya berfungsi sebagai

Muhamad Hijran, 2018

PERAN PENDIDIKAN POLITIK KADER PARTAI DALAM MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

alat kontrol kader yang duduk di parlemen sebagai pembawa aspirasi, justru tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Kemudian, Setiyono (2010, hlm. 10) mengungkapkan bahwa Hubungan antara warga dan politisi biasanya ditandai oleh lemahnya kapasitas politik di kedua belah pihak. Pernyataan ini memperkuat pendapat bahwa kita sedang mengalami krisis etika politik. Muchtar (2017, hlm. 71) mengatakan bahwa

Krisis ini telah menerpa bagian fundamental nilai dasar etika politik yaitu kejujuran dan keadilan. kejujuran menjadi barang langka bahkan yang unjuk kejujuran dikalahkan oleh ketidakjujuran atau kebohongan, lebih parah lagi manakala nilai-nilai dasar pancasila tidak dijadikan sumber bagi kekokohan bagi etika politik.

Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi karena melemahnya komitmen bangsa terhadap sumber nilai etika politik tersebut. Kondisi yang terjadi saat ini cukup memprihatinkan, dimana terjadi kemerosotan dalam perilaku politik kita (Purwanto, 2008, hlm. 5). Sebenarnya hal yang mendasar yang menyebabkan hal itu adalah tidak terlaksananya secara maksimal pendidikan politik di internal partai. Hematnya, hancurnya tatanan politik di negeri ini merupakan imbas minimnya dunia pendidikan politik terhadap kadernya dalam menyentuh nilai kearifan politik. Disinilah urgensi pendidikan politik bagi para kader partai agar melek politik (*political literacy*). Sehingga para anggota partai tidak menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dengan demikian mendorong pelaksanaan pendidikan politik agar anggota-anggota partai politik yang duduk di lembaga legislatif memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Hariyono dalam Alfaqi (2015, hlm. 112) bahwa “Nasionalisme di Indonesia merupakan suatu cara untuk “saringan ideologis” yang berbasis nilai-nilai luhur yang telah lama berkembang di nusantara”. Lebih tegas Sitepu (2012, hlm. 164) mengatakan “individual sebagai kekuatan politik merujuk aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik”. Oleh sebab itu, para kader politik perlu mendapatkan pendidikan politik yang lebih memadai, konstruktif dan sistematis yang dibutuhkan dalam membentuk kompetensi para kader politik.

Muhamad Hijran, 2018

PERAN PENDIDIKAN POLITIK KADER PARTAI DALAM MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Dengan adanya pendidikan politik melalui kegiatan peran partai bertujuan agar kader partai mengerti mengenai sistem politik. Suryadi (2017) mengungkapkan bahwa:

Perbaikan pertama yang harus dilakukan adalah perbaikan dari sisi etik, sehingga kemajuan dari sisi teknik tidak menyisakan disparitas yang melebar pada bidang etik. Pekerjaan rumah kedua adalah membaca kemajuan politik Indonesia dari apa yang dirasakan rakyat, bukan menurut persepsi elit semata. Kebanyakan rakyat masih berpikir “dari tangan ke mulut”, orientasinya masih kebendaan dan kekinian.

Sunatra (2016, hlm. 13) bahwa pada dasarnya pendidikan politik itu adalah pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik. Pemikiran kita tentang pendidikan yang berkaitan erat dengan sifat konflik dalam filsafat politik jelas terkait dengan krisis ideologi neoliberal. (Szkudlarek et al., 2013). Lebih lanjut Nugroho (1983, hlm. 199) mengatakan bahwa ideologi sebagai gagasan sentral sesuatu kelompok atau bangsa mempunyai peranan menentukan untuk mencegah desintegrasi sosial atau anarki nasional yang merupakan tendensi umum di kalangan-kalangan negara-negara berkembang. Oleh sebab itu, ideologi Pancasila harus menjadi landasan bagi jalannya pendidikan politik di Indonesia. Suryadi (2017) maka yang harus dilakukan segera adalah

menukar "kaca mata politik" kita, sebuah kaca mata yang mempertajam pandangan tegak lurus, tidak miring ke kiri atau condong ke kanan. Persis kaca mata yang dipakai Soekarno ketika melihat sawah yang menghijau, gunung yang membiru, mendengarkan lagu daerah, Pangkur Palaran, atau Olesio dari Maluku, yang dilihat dan didengarnya adalah Indonesia. Indonesia yang utuh dan menyeluruh, bukan hanya ruang untuk berkiprah semua warga, tetapi juga tempat akhir menutup mata

Nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan dapat menjadi aspek yang penting bagi setiap warga negara dalam bertingkah laku selaku warga Negara Indonesia. Sehingga mempengaruhi kualitas keputusan dan partisipasi politik dari elite politik terhadap sistem politik yang berlaku ideal menurut Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada

Muhamad Hijran, 2018

PERAN PENDIDIKAN POLITIK KADER PARTAI DALAM MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

hakikatnya, partai politik menjadi aktor dalam membangun kultur dan perilaku politik yang baik. Sebagai pemeran utama, maka elit partai politik harus menjadi guru politik bagi warga negara, menjadi contoh dan memberi pengetahuan yang benar tentang politik dalam mengelola negara. Sebab pendidikan politik akan memberikan kesadaran mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan politik merupakan agenda yang sangat penting bagi bangsa yang terbebas dari penjajahan, demokrasi atau proses demokratisasi memerlukan syarat mutlak keterdidikan rakyat secara politik. (Gorham, 2005) mendefinisikan pengetahuan politik sebagai “berbagai informasi faktual tentang politik yang disimpan dalam memori jangka panjang”. Suharti (2014, hlm. 71) mengemukakan bahwa pendidikan politik dalam arti memberi kesadaran dan pemberdayaan agar masyarakat mampu memahami perannya sebagai warga negara, mampu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan diri dan tetap kelompoknya. Selain itu, Etika politik menjadi salah satu point penting dalam tingkah laku para kader partai. Menurut Franz Magnis (2016, hlm xxix) apabila suatu bangsa bertekad untuk membangun kehidupannya sesuai dengan dan berdasarkan nilai-nilai luhurnya, etika politik dapat menyumbangkan keahliannya dalam bidang normative etis untuk merealisasikan tekad itu. Kader dan etika merupakan suatu *packaging* yang tidak bisa dilepaskan dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain dan partai dianggap sebagai wadah atau tempat terjadinya pendidikan politik terhadap kader (Adi & Kharismandari, 2015, hlm. 319). Pendidikan politik yang diberikan mengacu pada etika politik bagi para kader, maka hasil dari pendidikan politik yang diberikan partai kepada kader membuat kader memiliki tugas untuk mengantarkan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah.

Partai politik dapat dijadikan tempat setiap warga negara untuk mengaplikasikan ilmu politik yang diperoleh sebagai perwujudan partisipasi politik. Peneliti memilih Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertama: Partai Gerakan Indonesia Raya merupakan salah satu partai yang besar, apalagi figur Prabowo Subianto masih dianggap figur yang kuat untuk Partai Gerindra memperoleh dukungan publik.

Muhamad Hijran, 2018

PERAN PENDIDIKAN POLITIK KADER PARTAI DALAM MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Kedua: Pendidikan Politik Partai Gerakan Indonesia Raya berkaitan dengan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Ketiga: Partai Gerakan Indonesia Raya merupakan partai yang di kenal dengan sebuah partai yang eksklusif dalam kaderisasi kepemimpinan baik itu tingkat legislatif maupun tingkat eksekutif, dikarenakan masih adanya peranan yang amat sangat besar dari ketua dewan pembina Prabowo Subianto dalam menentukan calon kandidat kepemimpinan baik itu dilegislatif maupun eksekutif..

Disinilah letak keterkaitan antara pendidikan politik dengan membentuk karakter warga negara dalam menunjang Pendidikan Kewarganegaraan. Warga negara yang terdidik secara politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga bisa secara otonom ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam semua pengambilan keputusan, memantau proses keputusan publik, dan melakukan advokasi terhadap akses kebijakan publik. Nasution (2012, hlm. 36) mengemukakan bahwa masyarakat harus menyadari pentingnya meningkatkan wawasan kebangsaan untuk masa-masa mendatang karena kalau tidak di lakukan maka akan semakin timbul degradasi dalam *National and Character Building*. Dengan demikian disinilah ruang untuk melakukan revitalisasi sistem pendidikan sebagai pendidikan etika politik pancasila untuk kepentingan pembentukan warga negara yang baik berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepa Tuhan Yang maha Esa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Partai Gerindra khususnya DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat. Setelah penulis mengadakan studi pendahuluan melalui observasi lapangan yang dilakukan di DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jl. PH.H. Mustofa No.58, Neglasari, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40124, dengan ini peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian ini dengan judul: Peran Pendidikan Politik Kader Partai dalam Membentuk Karakter Bertanggung Jawab (Studi Kasus Pada DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Jawa Barat) karena Partai Gerindra memiliki pendidikan politik diperuntukkan bagi kader partai, baik itu kader lama maupun kader baru.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Muhamad Hijran, 2018

PERAN PENDIDIKAN POLITIK KADER PARTAI DALAM MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan permasalahan yang penulis utarakan di latar belakang, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terkait dengan tesis ini, diantaranya: *Pertama*, partai politik sebagai infrastruktur politik belum melaksanakan fungsinya secara optimal, terutama pendidikan politik terhadap kadernya; *Kedua*, partai politik belum melakukan secara rutin pendidikan politik kepada kadernya; *Ketiga*, sistem politik efikasinya belum seperti yang diharapkan, belum diikuti perubahan maksimal dari sisi kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan; *Keempat*, kurang adanya upaya pengkaderan secara sungguh-sungguh. Karena itu focus kajian yang ditulis oleh penulis adalah berkaitan dengan bagaimana peran pendidikan politik kader partai dalam membentuk karakter bertanggung jawab (Studi Kasus pada DPD Partai Gerindra Jawa Barat).

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi kader gerindra dapat dikembangkan melalui pendidikan politik?
2. Mengapa terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik bisa ditransformasikan menjadi partisipasi politik melalui pendidikan politik gerindra?
3. Apa bentuk program pendidikan politik partai gerindra yang dapat meningkatkan partisipasi warga negara dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan?
4. Mengapa proses pendidikan politik diperlukan dukungan pemikiran dan teori pendidikan politik berdasarkan sesuai dengan Pendidikan Kewarganegaraan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara faktual mengkaji dan menganalisis pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD Partai Gerindra Jawa Barat dalam membentuk kader yang memiliki karakter bertanggung jawab.

Menurut Creswell (2010, hlm.167), tujuan penelitian adalah kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran-sasaran, maksud atau

Muhamad Hijran, 2018

PERAN PENDIDIKAN POLITIK KADER PARTAI DALAM MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

gagasan umum diadakannya suatu penelitian. Lebih lanjut Muchtar (2015, hlm. 136) dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah mengkaji realita kehidupan secara menyeluruh, tidak dapat dilakukan hanya melalui pengalaman seseorang yang bersifat individual, tetapi harus melalui mempertimbangkan jalinan antar individu anggota kelompok masyarakat yang diteliti. Jadi singkatnya tujuan penelitian kualitatif itu mengkaji kehidupan manusia secara holistik dapat lebih bermakna daripada melihatnya dalam kondisi terpisah-pisah.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui kompetensi kader gerindra yang dapat dikembangkan melalui pendidikan politik.
2. Untuk menganalisis terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik yang ditransformasikan menjadi partisipasi politik melalui pendidikan politik gerindra.
3. Untuk menganalisis bentuk program pendidikan politik partai gerindra yang dapat meningkatkan partisipasi warga negara dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan.
4. Untuk mendeskripsikan proses pendidikan politik Partai Gerindra yang diperlukannya dukungan pemikiran dan teori pendidikan politik berdasarkan sesuai dengan Pendidikan Kewarganegaraan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara keilmuan (teoritik) maupun secara empiric (praktis). Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritik

Dengan dilakukannya penelitian ini akan menambah pengetahuan perpolitikan penulis dan orang yang membaca hasil penelitian ini, terutama pengetahuan mengenai pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat dari segi Kebijakan

Pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan secara berkesinambungan dapat membentuk karakter warga negara yang baik serta bertanggung jawab. Untuk itu pendidikan politik menjadi penting diberikan

Muhamad Hijran, 2018

PERAN PENDIDIKAN POLITIK KADER PARTAI DALAM MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

kepada setiap pengurus, kader, simpatisan dan masyarakat luas sejak sedini mungkin.

1.4.3 Manfaat dari segi Isu serta Aksi Sosial

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal terutama terkait dengan hasil dari program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPD Partai Gerindra Jawa Barat guna membentuk kader yang memiliki karakter bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan pertahanan keamanan.

1.4.4 Manfaat Praktis:

- a. Diketahuinya kompetensi kader gerindra yang dapat dikembangkan melalui pendidikan politik.
- b. Diketahuinya terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik yang ditransformasikan menjadi partisipasi politik melalui pendidikan politik gerindra
- c. Diketahuinya bentuk program pendidikan politik partai gerindra yang dapat meningkatkan partisipasi warga negara dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan.
- d. Diketahuinya proses pendidikan politik Partai Gerindra yang diperlukannya dukungan pemikiran dan teori pendidikan politik berdasarkan sesuai dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

1.5 Struktur Organisasi Penulisan Tesis

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan
Membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi penulisan tesis.
- BAB II** Tinjauan Pustaka
Membahas teori-teori yang memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yakni berupa teori yang mendukung dari proses penelitian yang diuraikan secara sistematis.

Muhamad Hijran, 2018

PERAN PENDIDIKAN POLITIK KADER PARTAI DALAM MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

- BAB III** Metodologi Penelitian
Berupa cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data, serta langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan pada saat pelaksanaan penelitian.
- BAB IV** Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri A. Gambaran umum lokasi penelitian, B. Deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil temuan penelitian
- BAB V** Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi
Memuat kesimpulan dan saran-saran yang dapat peneliti rekomendasikan kepada pihak – pihak yang terkait dengan topik dan fokus penelitian ini, khususnya pemerintah terkait dan partai politik yang terkait yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya.

1.6. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian kualitatif adalah rumusan dasar yang diyakini oleh peneliti untuk mengidentifikasi masalah penelitian dan memecahkan masalah tersebut. Paradigma berfungsi membimbing peneliti untuk melakukan inquiri, interpretasi, menyimpulkan, dan mengabstraksi serta mengkonstruksi prinsip atau teori sebagai hasil penelitian (Muchtari, 2015). Maka dalam penelitian ini, paradigma penelitian yang dibangun dengan judul Peran Pendidikan Politik Kader partai dalam membentuk karakter bertanggung jawab (studi kasus pada DPD Partai Gerindra Jawa Barat) lebih lanjut dapat dijelaskan pada BAB II Kajian Teori.